

OPTIMALISASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN: PENDAMPINGAN PERSIAPAN AUDIT PADA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DI KABUPATEN MOJOKERTO

Saiful Anam

Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sehat Mojokerto

Artikel info	ABSTRAK
Corresponding Author: Saiful Anam saifulanam@ubs-ppni.ac.id Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto	Program optimalisasi dalam penyusunan laporan keuangan melalui pendampingan persiapan audit bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajemen keuangan dan kesiapan audit Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sesuai dengan dukungan teknis. Banyak lembaga yang menghadapi tantangan dalam menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan lengkap, serta mempersiapkan audit secara efektif. Program ini menyediakan pendampingan dalam akuntansi dasar, penggunaan perangkat lunak akuntansi, dan pengembangan sistem dokumentasi yang sistematis. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan keterampilan akuntansi bagi pengurus BKM, efisiensi dalam pencatatan transaksi, dan ketepatan laporan keuangan. Dokumentasi yang lengkap dan teratur memudahkan verifikasi saat audit, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan. Penerapan sistem pengendalian internal membantu mencegah kesalahan dan penyimpangan. Program ini juga meningkatkan kesiapan BKM dalam menghadapi audit, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang memperkuat kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Keywords: <i>Persiapan Audit, Laporan Keuangan dan SAK ETAP</i>
This article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)	

PENDAHULUAN

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan organisasi penting yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor, seperti ekonomi, masyarakat, dan budaya. BKM telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan di Kabupaten Mojokerto melalui beragam inisiatif dan kegiatan. Namun demikian, seiring dengan bertambahnya tugas dan tanggung jawab BKM, kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi semakin penting. Memastikan keakuratan dan transparansi laporan keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang efektif tidak hanya menggambarkan keadaan keuangan BKM secara akurat, namun juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan, evaluasi program, dan perencanaan tindakan di masa depan (Hazmi, Utami,

Choeri, Silfana, & Mustofa, 2023). Selain itu, laporan keuangan yang dibuat dengan cermat merupakan persyaratan utama untuk melakukan audit keuangan. Teks pengguna adalah referensi ke sumber atau kutipan.

Audit keuangan merupakan prosedur yang diperlukan untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan yang disusun oleh BKM secara akurat mewakili status keuangan sebenarnya dan mematuhi prinsip akuntansi yang relevan. Melakukan persiapan audit yang komprehensif dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kerentanan dalam sistem pengelolaan keuangan BKM, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Meski demikian, banyak BKM di Kabupaten Mojokerto menghadapi banyak tantangan dalam pembuatan laporan keuangan. Tantangan tersebut antara lain kurangnya personel yang memiliki keahlian dan kemampuan akuntansi, kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi, dan kurangnya arahan dalam melakukan audit. Hambatan-hambatan ini dapat menghambat BKM dalam mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan. Setiap organisasi diharuskan untuk menghasilkan laporan keuangan pada akhir jangka waktu tertentu untuk mengevaluasi status keuangannya dan pendapatan berikutnya. Menurut (Bestari & Wahyuni, 2023) tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang status keuangan perusahaan, kinerja, dan perubahan status keuangannya. Informasi ini sangat penting untuk membuat keputusan ekonomi. Teks pengguna adalah Laporan keuangan merupakan komponen laporan pertanggungjawaban manajemen untuk suatu periode akuntansi tertentu (Feronika, Sri Wahyuni, Yusmaniarti, & Khair, 2023). Hal ini berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pengurus BKM.

Auditing adalah proses melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara menyeluruh dan metodis, termasuk catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, oleh pihak independen. Tujuannya adalah untuk membentuk opini atas keakuratan dan kewajaran laporan keuangan. Tujuan utama pelaksanaan audit laporan keuangan adalah untuk memberikan penilaian terhadap keakuratan dan keandalan laporan keuangan secara keseluruhan, memastikan bahwa laporan tersebut mematuhi peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Teks pengguna diapit dalam tag. Penilaian atas kewajaran laporan keuangan ditentukan dengan mengevaluasi asersi yang dibuat pada setiap elemen yang terdapat didalam laporan keuangan perusahaan. Untuk melakukan audit atas laporan keuangan BKM, perlu mengikuti pedoman dan membuat dokumentasi yang diperlukan. Ini menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, memberikan informasi yang akurat, dan didukung oleh bukti dan catatan yang memadai. Tujuan dari persiapan audit laporan keuangan adalah untuk memudahkan proses bagi individu yang membuat laporan keuangan pada saat menjalani audit yang dilakukan oleh entitas eksternal. Setiap entitas diharuskan menyusun laporan keuangan pada akhir setiap kuartal untuk menilai kondisi keuangan dan profitabilitasnya. (Wahyusetiawan, 2019) menyatakan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan data mengenai kondisi keuangan, performance keuangan, serta perubahan posisi keuangan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan ekonomi yang handal didukung dengan informasi yang akurat.

Laporan keuangan merupakan wujud real atas laporan pertanggungjawaban pengelolaan suatu periode akuntansi tertentu dan dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kinerja pengelolaan BKM. Audit adalah evaluasi yang cermat dan metodis yang dilakukan oleh entitas yang tidak memihak atas laporan keuangan yang disusun atau dibuat manajemen, yang meliputi catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung, untuk memberikan penilaian atas ketidakberpihakan laporan keuangan. Tujuan utama audit laporan keuangan untuk memberikan penilaian terkait kewajaran laporan keuangan dalam semua aspek penting, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Arif, 2017).

Integritas laporan keuangan ditentukan oleh afirmasi yang dilakukan terhadap setiap komponen yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Untuk melakukan audit atas laporan keuangan BKM perlu berpegang pada peraturan dan prosedur yang menjamin penyusunan laporan tersebut sesuai dengan peraturan terkait. Selain itu, laporan harus menyertakan informasi yang akurat dan didukung oleh bukti dan catatan yang cukup. Tujuan dari pedoman dan persiapan audit laporan keuangan adalah untuk memudahkan proses bagi individu yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan ketika menjalani audit yang dilakukan oleh pihak ketiga. Prasyarat utamanya adalah laporan keuangan BKM yang telah diaudit harus dirumuskan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), juga disebut sebagai Standar Pelaporan Keuangan Internasional untuk Entitas Kecil dan Menengah (Maryanto, 2020).

SAK ETAP mungkin lebih cocok untuk entitas dibandingkan SAK biasa, karena SAK ini membebaskan kewajiban pelaporan yang lebih ketat. SAK ETAP berlaku bagi badan usaha yang kurang memiliki akuntabilitas publik. Entitas yang tidak akuntabel publik adalah entitas yang kurang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan namun masih menghasilkan laporan keuangan bertujuan umum untuk pengguna eksternal. SAK ETAP diperkenalkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Januari 2011. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengoptimalkan proses penyusunan laporan keuangan dengan memberikan bantuan persiapan audit pada Badan Pengaturan Masyarakat (BKM) Kabupaten Mojokerto untuk memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi standar yang diinginkan. Informasi yang diberikan telah sesuai dengan SAK ETAP dan didukung oleh bukti dan catatan yang komprehensif sehingga siap untuk diaudit (Refitasari, 2019).

Tujuan dari upaya pembinaan ini adalah untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi BKM dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan. Dengan menggunakan temuan dari proses identifikasi ini, analisis masalah dapat dibuat untuk mengevaluasi berbagai kebutuhan/materi yang akan diberikan pada saat pembekalan. Selanjutnya materi ini kemudian digunakan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh setiap BKM ketika melakukan audit atas laporan keuangan. (Pratama & Puspitasari, 2022) menyatakan bahwa bantuan audit dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan memastikan ketersediaan informasi penting, mengatur pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait, dan menawarkan dukungan teknis kepada tim auditor. Teks pengguna adalah.

Selain itu, (Christiana, Widaryanti, & Luhglatno, 2021) menegaskan bahwa dukungan audit dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan sikap proaktif

terhadap manajemen risiko, meningkatkan sistem pengendalian internal, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Teks pada user adalah “[7]”. Maksud dan tujuan utama dari kegiatan peningkatan penyusunan laporan keuangan melalui bantuan persiapan audit pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kabupaten Mojokerto tidak lain untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola BKM dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan melakukan audit laporan keuangan. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada BKM dalam penyusunan laporan keuangan yang mematuhi standar akuntansi dan melakukan audit secara menyeluruh. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan BKM, menyediakan sistem keuangan yang lebih kuat, dan memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan.

Tujuan sebenarnya dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman akuntansi: Membekali pengurus dan anggota BKM dengan pengetahuan dan kemampuan dasar di bidang akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
2. Meningkatkan ketepatan laporan keuangan: Membantu BKM dalam menghasilkan laporan keuangan yang tepat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan.
3. Peningkatan kesiapan audit: Memberikan BKM keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk mempersiapkan audit keuangan secara efektif, yang mencakup pemahaman prosedur audit, prasyarat dokumentasi, dan strategi pengelolaan penemuan audit.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi: Memperkuat sistem pengelolaan keuangan BKM untuk menjamin dokumentasi dan pelacakan yang benar atas seluruh dana yang dikelola, memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Dengan meningkatkan pelaporan keuangan dan melakukan audit yang transparan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap BKM akan tumbuh, sehingga meningkatkan efektivitas dan kelangsungan inisiatif pemberdayaan yang dilaksanakan dalam jangka panjang.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas BKM di Kabupaten Mojokerto sebagai katalis pemberdayaan masyarakat, dengan tetap menjaga pengelolaan seluruh dana secara transparan dan akurat.

Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja sebagai alat indikator terlaksananya kegiatan pendampingan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kabupaten Mojokerto, diukur dengan tolak ukur kinerja berikut :

Capaian program	a. Melakukan identifikasi masalah. b. Melakukan analisis masalah dan menentukan formulasi materi pembekalan c. Pelaksanaan pembekalan dalam rangka problem solving d. Melakukan evaluasi kesiatan
Keluaran	Terlaksananya kegiatan optimalisasi penyusunan laporan keuangan melalui pendampingan persiapan audit pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kabupaten Mojokerto.
Hasil	Audit laporan keuangan bagi pengelola BKM
Kelompok sasaran	Peserta pendampingan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kabupaten Moiockerto.

Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan optimalisasi penyusunan laporan keuangan melalui Pendampingan Persiapan Audit pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dilaksanakan di Pendopo Villa Mediana, yang beralamatkan di Desa Sajen, Kecamatan Pacet - Kabupaten Mojokerto.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Berikut timeline pelaksanaan inisiatif perbaikan penyusunan laporan keuangan dengan membantu persiapan audit pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kabupaten Mojokerto:

a. Tahap pertama

Mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi BKM yang ditunjuk pada tahap pertama. Hal ini mencakup identitas BKM, keadaan laporan keuangan yang telah disusun, keahlian dan pengalamannya dalam melakukan audit, serta tantangan apa saja yang mereka hadapi saat menyusun audit/pemeriksaan laporan keuangan.

b. Tahapan kedua

Pemberian arahan, nasihat, dan dukungan dalam:

- Mengkarakterisasi persyaratan yang termaktub pada SAK ETAP dan mengetahui cara menghasilkan laporan keuangan menggunakan standar ini adalah dua aspek dalam pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
- Aspek pemeriksaan laporan keuangan melalui penjelasan persiapan yang diperlukan untuk audit laporan keuangan.

c. Tahapan ketiga

Memberi saran dalam menyelesaikan permasalahan dan mengatasi tantangan yang dihadapi pengelola BKM saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

d. Tahapan keempat

Penilaian terakhir terhadap penerapan dukungan, keahlian, dan kemampuan dalam pemeriksaan laporan keuangan.

METODE

Tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan penutupan disusun secara metodis dan menyeluruh untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Spesifik setiap tahap adalah sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

1. Pembentukan tim pendampingan dan konsultasi
Struktur organisasi untuk bantuan pada awalnya dibentuk, diikuti oleh tim konsultasi dan bantuan. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan program pendampingan dan konsultasi berfungsi dengan lancar dan memberikan hasil yang diinginkan. Tim konsultasi dan bantuan terdiri dari tenaga ahli, tenaga administrasi, dan tenaga pembantu BKM Kabupaten Mojokerto.
2. Studi literatur
Fase penting ini berfungsi sebagai panduan untuk memberikan nasihat dan dukungan, khususnya yang berkaitan dengan Pedoman Umum Akuntansi Sektor Riil.
3. Menciptakan instrumen untuk memberikan arahan dan dukungan
Instrumen terlebih dahulu disiapkan untuk mengumpulkan data dan informasi dari BKM sebelum mengunjungi atau membantu BKM. Dalam pemeriksaan laporan keuangan, digunakan dua jenis instrumen: lembar identifikasi dan lembar data BKM. Identitas BKM, visi, misi, dan tujuan, struktur organisasi, ciri-ciri administrasi organisasi, sistem pengendalian intern, tata usaha pembukuan (keuangan), dan peraturan yang berlaku saat ini semuanya dimuat dalam Lembar Data BKM. Sedangkan Lembar Identifikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan memuat dokumentasi pendukung dan bukti mengenai kewajaran laporan keuangan yang dibuat BKM serta kesesuaiannya terhadap SAK ETAP.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Tahap Pertama
Menentukan dan mengevaluasi permasalahan yang ada, menggunakan dua instrumen yang telah disiapkan, yaitu Lembar pertama Data BKM dan Lembar kedua Identifikasi dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan, dilakukan identifikasi di tingkat BKM pada tahap pertama. Selain menggunakan alat tanya jawab yang sudah ada, juga dilakukan pembicaraan dan wawancara dengan jajaran pengurus serta pengawas. Bagi setiap BKM, hasil tugas tersebut dicatat pada kedua lembar instrumen.
Untuk keperluan pemberian pendampingan, konsultasi, dan pendampingan di kemudian hari, temuan analisis data yang tercatat dalam instrumen akan dijadikan acuan (tahap kedua).
2. Tahap Kedua
 - i) Pemberian bimbingan dan konsultasi serta pendampingan
Menindaklanjuti temuan analisis dengan memberikan saran, bimbingan, dan pendampingan dengan topik sebagai berikut:
 - Aspek pembuatan laporan keuangan menggunakan SAK ETAP Bagaimana menentukan persyaratan SAK ETAP mana yang perlu dipenuhi dan bagaimana membuat laporan keuangan menggunakan SAK ETAP.
 - Fitur audit atas laporan keuangan dan dokumentasi yang diperlukan.
 - ii) Memberi rekomendasi dan implementasi

Setelah kegiatan pendampingan, penyuluhan, dan pendampingan selesai, tim dapat memberikan saran kepada pimpinan BKM untuk melakukan koreksi yang diperlukan untuk selanjutnya memastikan bahwa laporan keuangan yang telah disusun secara akurat. Selain itu, saran-saran tersebut harus segera dipraktikkan oleh pimpinan BKM agar kinerja BKM semakin meningkat.

3. Tahap Ketiga

Evaluasi hasil pelaksanaan, tujuan tahap ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan (peningkatan kinerja) BKM sehubungan dengan hasil pelaksanaan yang telah dilakukan pimpinan dan pengurus dalam rangka audit laporan keuangan.

C. Tahap Penutup

Pada tahapan ini, semua tindakan implementasi perlu didokumentasikan secara tertulis sesuai dengan peraturan terkait. Laporan dapat berfungsi sebagai sumber pertanggungjawaban atas tindakan serta referensi bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Sistematika laporan kegiatan ini meliputi:

1. Laporan awal

Laporan awal ini berfungsi sebagai titik tolak dan pedoman dalam menjalankan inisiatif penyempurnaan penyusunan laporan keuangan dengan mendukung persiapan audit pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kabupaten Mojokerto.

2. Laporan akhir

Laporan akhir hasil kegiatan pendampingan merupakan pelaksanaan hasil upaya perbaikan penyusunan laporan keuangan dengan membantu persiapan audit pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kabupaten Mojokerto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diharapkan setelah diterapkannya solusi yang dirancang dari pendampingan penyusunan laporan keuangan dan persiapan audit pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi awal dan analisis permasalahan

Perihal penerapan SAK ETAP, BKM juga telah menggunakan metode accrual basis; Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Berikut ini adalah daftar lengkap permasalahan yang ada di BKM:

- a. Laporan keuangan pada neraca telah dibuat secara akurat dan benar serta telah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b. Laporan laba rugi sudah siap, namun perlu diubah sesuai Peraturan Menteri dan UKM No. 12 Tahun 2015 dan SAK ETAP.
- c. Sesuai dengan Peraturan Menteri dan UKM Nomor 12 Tahun 2015, disarankan untuk memprioritaskan pendapatan dari usaha utama saat menyusun laporan laba rugi, disusul pendapatan lainnya.
- d. Laporan perubahan ekuitas menampilkan perubahan atau mutasi modal tetapi belum dibandingkan.
- e. Tidak ada catatan pada akun keuangan.

2. Pelaksanaan kegiatan konsultasi dan pendampingan

- a. Aspek penggunaan SAK ETAP untuk menyusun laporan keuangan

Laporan keuangan umumnya disusun dengan baik, adil, dan transparan. Sederhananya, ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan dalam rangka penerapan SAK ETAP serta Peraturan Menteri dan UKM No. 12 Tahun 2015 (Mursidah & Nasution, 2022). Tindakan-tindakan berikut telah diambil selama konsultasi mentoring:

- Bantuan dalam membuat laporan saldo
- Bantuan pembuatan laporan laba rugi.
- Bantuan dalam menyusun laporan perubahan ekuitas.
- Bantuan dalam pencatatan laporan keuangan.

b. Aspek audit laporan keuangan

BKM secara umum telah melakukan pemeriksaan dan pengawasan berkelanjutan dengan mengacu pada pemeriksaan laporan keuangan. audit yang telah selesai dan dijadwalkan untuk audit lain di masa mendatang.

Pendampingan mencakup tugas-tugas berikut: memberi nasihat tentang dokumentasi apa yang harus dipersiapkan untuk audit; membantu pelacakan dan verifikasi dokumen selama audit; memberi nasihat tentang audit kas dan bank; memberikan nasihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan materialitas dan apa yang merupakan bukti material untuk suatu audit; memberi nasihat tentang konfirmasi piutang dan perbandingan catatan piutang.

3. Perkembangan Pelaksanaan

Pemberian konsultasi atas kemajuan implementasi yang memadai.

Setelah memberikan arahan mengenai bidang-bidang tertentu dalam laporan keuangan dan auditnya, pengurus BKM telah menunjukkan perkembangan kemajuan pemahaman mereka terhadap laporan keuangan dan audit, serta dalam penyiapan semua data yang diperlukan.

Secara umum hal ini ditampilkan pada tabel berikut ini:

Aspek Sebelum pendampingan Sesudah pendampingan		
1. Penyusunan Laporan Keuangan		
a. Laporan laba rugi	Format urutan penyusunannya belum sesuai dengan SAK ETAP	Disusun ulang dengan berdasarkan aturan SAK ETAP
b. Laporan perubahan ekuitas	Disajikan hanya takun berjalan	Diperbaiki dengan disajikan perbandingan antara takun berjalan dengan takun sebelumnya
	Belum disajikan sesuai dengan SAK ETAP yang terdiri atas perubahan modal, saldo awal, penambalian dan pengurangan dan saldo akhir	Diperbaiki dengan berdasarkan aturan SAK ETAP dengan menyajikan perubahan modal, saldo awal, penambalian dan pengurangan dan saldo akhir
c. Catatan atas laporan keuangan (CALK)	Belum dibuat CALK	Menyusun CALK sesuai dengan akun-akun yang disajikan pada laporan keuangan
2. Audit Laporan Keuangan		
a. Dokumentasi	Sudali dilakukan tetapi belum lengkap	Semua transaksi liurus didukung dengan dokumen dan bukti secara lengkap
b. Audit kas	Sudali dilaksanakan tetapi hanya cash on hand	Untuk meyakini nilai kas dan setara kas harus didukung dengan rekening koran dan stock opname kas
c. Audit piutang	Belum ada konfirmasi piutang	Konfirmasi piutang akan dilakukan untuk semuanya, agar benar-benar diyakini nilai piutang yang tersaji dalam laporan keuangan
4 Audit persediaan	Belum dilakukan stock opname atas persediaan	Audit akan dilakukan stock opname atas persediaan
Aset tetap	Belum dihitung biaya penyusutannya	Dihitung kembali nilai aset tetap beserta penyusutannya dengan metode garis lurus.
3. Sistem Pengendalian Internal		
Prosedur pengendalian	Pengendalian internal sudali dilakukan namun masih belum sepenuhnya (lemah).	BKM menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, termasuk prosedur dan dokumentasi yang jelas dalam pengelolaan keuangan

Sumber : data internal diolah, 2024.

KESIMPULAN DAN SARAN

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara hukum wajib mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan. Kesimpulan tersebut diperoleh dari upaya peningkatan efisiensi penyusunan laporan keuangan dengan memberikan bantuan persiapan audit pada BKM di Kabupaten Mojokerto.

1. Kewajaran penyajian laporan keuangan: Laporan keuangan yang disusun oleh BKM yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, telah disajikan secara baik dan komprehensif. Meskipun demikian, nama akun rekening dan format laporan tertentu masih memerlukan modifikasi agar sesuai dengan SAK ETAP, beserta juga kesesuaian dengan Permen Koperasi dan UKM No. 12 Tahun 2015.
2. Perbandingan laporan keuangan: Mayoritas BKM belum memberikan laporan keuangan yang dapat dibandingkan, dan mereka tidak mempunyai bukti audit yang cukup untuk mendukung klaim mereka.
3. Pemahaman pemeriksaan laporan keuangan: Pemahaman pemeriksaan laporan keuangan di BKM cukup memuaskan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.

Beberapa saran untuk keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan akuntansi dan penggunaan perangkat lunak akuntansi:
Pelatihan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan pengurus tetap terbaru dan dapat mengikuti perkembangan standar akuntansi dan teknologi.
2. Pengembangan dan penguatan sistem pengendalian internal:
Ini termasuk revisi dan pembaruan prosedur keuangan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tetap efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan manual kebijakan dan prosedur keuangan yang komprehensif:
Manual ini harus mencakup semua aspek pengelolaan keuangan dan prosedur audit, serta harus diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam peraturan dan praktik terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Kejelasan Tujuan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang Panjang). *Artikel Ilmiah*.
- Bestari, K. A., & Wahyuni, F. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16995>
- Christiana, A., Widaryanti, W., & Luhglatno, L. (2021). Reputasi KAP & Komite Audit pada Integritas Laporan Keuangan Dimoderasi Komisaris Independen & Kepemilikan Institusional. *Perspektif Akuntansi*. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i1.p59-74>
- Feronika, T., Sri Wahyuni, M., Yusmaniarti, Y., & Khair, U. (2023). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP

- INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*. <https://doi.org/10.36085/jakta.v4i2.5544>
- Hazmi, F., Utami, C. B., Choeri, I., Silfana, N., & Mustofa, A. B. (2023). Analisis SWOT sebagai Strategi Pengembangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*. <https://doi.org/10.51214/japamul.v3i2.640>
- Maryanto. (2020). Persepsi Atas Tujuan Laporan Keuangan Dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM. *Al-Dzahab*.
- Mursidah, S., & Nasution, J. (2022). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Tunas Wira Mandiri. *Pendidikan Tambusai*.
- Pratama, R., & Puspitasari, W. (2022). PENGARUH FINANCIAL DISTRESS TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Ekonomi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14555>
- Refitasari, A. (2019). Mengenal Tujuan dan Tahapan Audit Laporan Keuangan. *OSF Preprints*.
- Wahyusetiawan. (2019). Tujuan Laporan Keuangan Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan).